

## PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA DI DESA SUNGAI RENGAS

oleh : A'ang Kurniawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak.  
email: [kurnia\\_aang@yahoo.com](mailto:kurnia_aang@yahoo.com)

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem dan usaha agribisnis kelapa di Desa Sungai Rengas belum berkembang secara optimal dan kinerja antar simpul-simpul agribisnis belum terintegrasi dengan baik. Permasalahannya lainnya adalah sosialisasi dan peningkatan pengetahuan warga tentang komoditas kelapa, cara bercocok tanam dan cara pemeliharaan kelapa dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dilakukan. Disamping itu dari pihak pemerintah belum memberikan solusi alternatif yang lebih memihak pada petani. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya instansi terkait dalam menyadarkan masyarakat petani kelapa Desa Sungai Rengas agar memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya instansi terkait dalam menyadarkan petani kelapa Desa Sungai Rengas agar memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian pada dasarnya sudah cukup baik. Namun dalam implementasinya dari sembilan program pemberdayaan petani kelapa hanya bisa tiga poin saja yang dapat dilaksanakan di Desa Sungai Rengas, itupun pelaksanaannya belum optimal. Ketiga poin tersebut antara lain, pendidikan dan pelatihan masyarakat, kegiatan penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan temuan penelitian bahwa kendala dalam memberdayakan petani kelapa di Desa Sungai Rengas adalah terbatasnya anggaran dan jumlah petugas penyuluh pendamping. Menyikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan bahwa pemberdayaan masyarakat petani kelapa adalah proses yang berkelanjutan sehingga evaluasi pemberdayaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

Kata kunci : Pemberdayaan, Petani Kelapa

### ABSTRACT

*The problem in this research is the system and palm agribusiness in Sungai Rengas not develop optimally and performance between the nodes is not well integrated agribusiness. Other problem is socialization and increase citizen knowledge about coconut, how to grow crops and coconut maintenance way to use science and technology has not been done. Besides, from the government has not provided an alternative solution more favorable to farmers. This study aims to describe the efforts of agencies involved in public awareness Sungai Rengas coconut farmers in order to have the ability, skills and expertise and. The results showed that the efforts of relevant agencies in the wake of coconut farmers Sungai Rengas to have the ability, skills and expertise, and basically good enough. However, in the implementation of nine coconut farmer empowerment program could only be three points which can be carried out in the village of River Rengas, and even then its implementation is not optimal. These three points are, among others, education and community training, counseling and mentoring*

*activities and institutional strengthening farmers. Based on the research findings that the constraints in the coconut empower farmers in Sungai Rengas is the limited budget and the number of extension workers companion. Responding to the suggestion that the phenomenon exists recommended that coconut farming community empowerment is an ongoing process that empowerment evaluation should be done gradually starting from before the program is executed, the initial implementation of the program, and periodic evaluation after implementation of the program, it is necessary to study more about the empowerment evaluation each stage in the implementation of the empowerment.*

*Keywords: Empowerment, Coconut Farmers*

## **PENDAHULUAN.**

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri, sehingga kegiatan tersebut seharusnya mendapat

dukungan dan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Wilson (1996) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya, karena pada dasarnya hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk kepentingan mereka sendiri.

Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan pemberdayaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Dalam implementasinya ketiga

kegiatan tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan peran serta masyarakat dapat menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam yang dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu derajat keberdayaan masyarakat akan sangat bervariasi meskipun proses pengembangan kapasitas yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Desa Sungai Rengas adalah salah satu desa yang menerima program pemberdayaan masyarakat yaitu yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2007 dan masih berjalan sampai penelitian ini dilaksanakan. Desa Sungai Rengas merupakan salah satu lokasi yang dianggap cukup berhasil dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

karena memiliki progress yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya maupun dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Petani Kelapa di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya instansi terkait dalam menyadarkan masyarakat petani kelapa Desa Sungai Rengas agar memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian.
- b. Untuk mengetahui sikap dan cara pandang masyarakat tentang keberlanjutan penerapan konsep pembangunan berbasis masyarakat di Desa Sungai Rengas.

## KAJIAN TEORI

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

1. Kesiadaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

Pengembangan masyarakat sejatinya merupakan proses, dan aspek terpenting dari integrasi proses tersebut adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. Proses pengembangan masyarakat harus menjadi sebuah proses yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri karena masyarakat sendirilah

yang mengerti akan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang mereka miliki.

Inti dari pengembangan masyarakat adalah proses peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan. Peningkatan kesadaran itu dapat dicapai melalui beberapa strategi, diantaranya melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan. (Ife dan Tesoriero, 2008: 148 dan 350).

Dalam pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342).

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, untuk

memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara dalam hal kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang selama ini kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Tujuan dari sebuah usaha pengembangan masyarakat dikatakan berhasil apabila proses yang dilaksanakan menuju ke arah pencapaian tujuan.

Berdasarkan kajian mengenai ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan baik pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat juga harus dilakukan pada tataran yang sama, yaitu pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan banyak menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya terutama dalam mengembangkan sebuah sistem pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam lingkup komunitas, proses peningkatan kapasitas adalah pada tataran kelembagaan komunitas dan pada tataran individu masyarakat.

#### **METODE**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang menggambarkan dan menerangkan fenomena yang berlaku pada suatu masyarakat terutama berkenaan dengan Pemberdayaan Petani Kelapa dalam Meningkatkan Produktivitasnya Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data lapangan,

peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Peneliti berusaha untuk mengamati dan memahami keadaan yang didapat di lapangan dengan membangun kesimpulan sementara sebagai bahan dalam pemecahan masalah dan bahan pengamatan selanjutnya. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian ini hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit yaitu desa agar penelitian lebih terfokus dan dapat menggali sebanyak-banyak informasi yang ada di lapangan.

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian mengenai Pemberdayaan Petani Kelapa dalam Meningkatkan Produktivitasnya Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Kepala Seksi Usaha Perkebunan.
3. Petugas Penyuluh Lapangan/pendamping sebanyak 2 orang.
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Sungai Rengas.
5. Masyarakat petani kelapa yang ditentukan secara acak sebanyak 5 orang.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi teknik. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.

Triangulasi teknik yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi serta pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upayainstansi terkait dalam menyadarkan masyarakat petani kelapa Desa Sungai Rengas agar memiliki kemampuan, keterampilan dan dan keahlian.

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap pelaksanaan pemberdayaan petani kelapa belum optimal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembudidayaan tanaman kelapa masih dikelola secara tradisional oleh

masyarakat. Hingga akhir tahun 2013 di Desa Sungai Rengas belum tersentuh oleh program pemberdayaan seperti program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), Program Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan program-program padat karya lainnya. Program pemberdayaan yang selama ini berjalan di Desa Sungai Rengas adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan kelanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai/Santunan Langsung Tunai (BLT/SLT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Hasil pengamatan di atas diperkuat oleh pernyataan Kabid Perkebunan Dinas Pertambangan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya yang menyatakan bahwa :

“...Di Kabupaten Kubu Raya saat ini baru 7 Desa yang menerima program bantuan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa diberikan bantuan sebesar 100 juta, ini untuk program PUAP yang anggarannya dari pemerintah pusat. Akan tetapi dalam setiap desa diharuskan ada sejumlah kelompok tani yang beranggotakan minimal 5-10 orang. Nah, kalo untuk Desa Sungai Rengas sepertinya belum menerima bantuan itu, akan tetapi sedang diusulkan....” (Hasil Wawancara penulis dengan Kabid Perkebunan, 4 Januari 2014).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Desa Sungai Rengas belum mendapatkan program pemberdayaan yang padat Karya dalam hal ini PUAP. Namun sedang dalam pengusulan instansi terkait. Selanjutnya Kabid Perkebunan Dinas Pertambangan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya menambahkan :

“...selama ini program pemberdayaan Petani Kelapa di Desa Sungai Rengas akan tetap menjadi prioritas. Walaupun hasilnya belum maksimal kami mempunyai sejumlah petugas penyuluh yang ditugaskan melakukan penyuluhan dan pendampingan pada petani di lapangan. Hal yang paling mendasar yang menjadi kendala kami adalah terbatasnya jumlah personil dan ketersediaan anggaran dari Pemda Kubu Raya...” (Hasil Wawancara penulis dengan Kabid Perkebunan, 4 Januari 2014).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa kendala yang paling mendasar yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan, Kehutanan dan pertambangan Kabupaten Kubu Raya dalam program pemberdayaan petani kelapa di Desa Sungai Rengas adalah terbatasnya jumlah personil dan minimnya anggaran yang tersedia.

Untuk memperkuat pernyataan Kabid Perkebunan di atas, penulis melakukan wawancara dengan Petugas Penyuluh Pendamping. Ketika ditemui penulis, informan mengutarakan bahwa :

“...Banyak Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kami yang terbengkalai dalam melakukan pendampingan. Seperti dalam hal identifikasi dan monitoring. Kami lebih banyak merogoh kocek sendiri ketika diminta monitoring di lapangan...” (Hasil Wawancara penulis dengan Petugas Penyuluh Pendamping, 4 Januari 2014).

Selanjutnya petugas penyuluh pendamping lainnya juga mengutarakan hal yang sama kepada penulis:

“...Usulan kegiatan kami banyak yang tertunda, dikarenakan harus menunggu cairnya anggaran. Hingga saat ini memang ada sih beberapa kegiatan yang sudah terealisasi dengan baik. Diantaranya penyaluran bibit tanaman

kelapa dan pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa. Namun jumlahnya tidak seoptimal yang kami usulkan. (Hasil Wawancara penulis dengan Petugas Penyuluh Pendamping, 4 Januari 2014).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 1 point 2 bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Dari kesembilan tahapan ini, penulis mengidentifikasi hanya ada 3 tahapan yang berhasil dilaksanakan di Desa Sungai Rengas diantaranya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, dan penguatan Kelembagaan Petani. Untuk lebih jelasnya sub-sub analisis dalam sub judul ini diuraikan berikut ini.

Pendidikan dan Pelatihan masyarakat, pada dasarnya adalah pelatihan motivasional yaitu pelatihan yang mendorong peserta untuk mempunyai paradigma dan sikap mental yang positif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan khususnya petani kelapa. Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan berupa tata cara budidaya tanaman kelapa dan pemanfaatan tumpang sari tanaman kelapa dengan tanaman bermanfaat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perkebunan diperoleh keterangan bahwa :

“...pendidikan dan pelatihan masyarakat yang diadakan di Desa Sungai Rengas khususnya bagi petani kelapa adalah bersifat non formal. Dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh petugas penyuluh pendamping. Dimana sebelum ditugaskan para penyuluh diberikan bimtek terlebih dahulu. Jadi yang banyak memahami tentang budidaya tanaman kelapa adalah para penyuluh, disinilah peran penyuluh sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang budidaya tanaman kelapa kepada petani...” (Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perkebunan, 4 Januari 2014).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi petani diadakan secara non formal. Dalam hal ini petugas penyuluh yang sebelumnya sudah mengikuti bimtek menyampaikan informasi dan pengetahuannya tentang tanaman kelapa langsung kepada masyarakat petani.

Selanjutnya petugas penyuluh pendamping menyatakan bahwa :

“...Kami memang dibekali bimtek sebelum melakukan pendampingan ke petani kelapa, namun kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat formal saja. Waktu pelaksanaan bimtek terjadwal kurang lebih 14 hari, namun dalam pelaksanaannya kami hanya diberikan bimtek selama 3 hari itupun pelaksanaannya dipadatkan hingga malam hari. Dengan demikian kami kurang faham dalam pemberdayaan petani kelapa...” (Wawancara penulis dengan Petugas Penyuluh Pendamping, 4 Januari 2014).

Untuk memperkuat keterangan di atas, penulis mewawancarai petani kelapa di Desa Sungai Rengas yang menyatakan bahwa:

“...Saya tahu membudidayakan tanaman kelapa dari orang tua saya, karena kebun ini merupakan kebun turun temurun. Saya tidak pernah mendapatkan pengetahuan dari petugas penyuluh pendamping...”

Petani Kelapa lainnya juga mengatakan bahwa :

“... Kame’ pernah dengar ada penyuluhan di Kantor Desa, tapi kame’ tadak diundang, hanya perwakilan kelompok saja. (Wawancara penulis dengan Petani Kelapa, 6 Januari 2014)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh petugas penyuluh pendamping tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan bimtek yang diikuti oleh petugas penyuluh hanya bersifat formal saja. Kemudian ketika melakukan penyuluhan pun kurang efektif karena pelaksanaannya hanya diikuti oleh perwakilan kelompok tani saja.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 45 disebutkan bahwa Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Kegiatan penyuluhan dan pendamping terhadap petani kelapa di Desa Sungai Rengas dilaksanakan langsung oleh petugas penyuluh pendamping yang setiap bulannya menyerahkan laporan dan koordinas ke Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya. Kepala Seksi Usaha

Perkebunan ketika penulis wawancarai mengutarakan bahwa :

“...Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani kelapa di Desa Sungai Rengas sepenuhnya dilaksanakan dengan menggunakan APBD Kabupaten Kubu Raya. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal, memang ada beberapa desa di Kabupaten Kubu Raya sudah bisa memaksimalkan hasil produksi kelapanya, itupun ketika mereka mendapatkan PUAP dari kementerian pertanian....” (Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perkebunan, 4 Januari 2014).

Selanjutnya petugas penyuluh pendamping menambahkan:

“...hingga saat ini pemberdayaan petani kelapa di Desa Sungai Rengas, baru pada tahap peremajaan tanaman kelapa dan penguatan kelembagaan. Ada beberapa area yang sudah diremajakan tanamannya. Sedangkan untuk kelembagaan sudah terbentuk 2 Gapoktan, yang anggota didalamnya adalah kumpulan kelompok tani. Untuk 1 kelompok biasanya beranggotakan 5-15 orang petani dari berbagai jenis usaha seperti petani kelapa, padi, dan peternak...” (Wawancara penulis dengan Petugas Penyuluh Pendamping, 4 Januari 2014).

Berdasarkan kedua kutipan wawancara di atas terlihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan petani kelapa khususnya dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sepenuhnya menggunakan APBD Kabupaten Kubu Raya, sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Namun demikian kegiatan pemberdayaan petani kelapa tetap berjalan hingga saat ini sudah ada peremajaan tanaman kelapa dan terbentuknya 2 Gapoktan.

## **2. Sikap dan Cara Pandang Masyarakat tentang keberlanjutan penerapan konsep**

### **pembangunan berbasis masyarakat di Desa Sungai Rengas.**

Kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program pembangunan pada dasarnya adalah untuk mendorong masyarakat mempunyai paradigma dan sikap mental yang positif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari pemecahan masalah yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan pelatihan bagi anggota Gapoktan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), maupun masyarakat pada umumnya disamping dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, diharapkan juga dapat membawa kepada perubahan perilaku sehingga dapat melakukan suatu kegiatan dengan lebih efektif.

Sasaran dari pelaksanaan pelatihan pada intinya terjadinya perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat, untuk itu proses evaluasi yang dilaksanakan juga dengan cara menilai sikap dan cara pandang masyarakat tersebut, bukan melalui kegiatan-kegiatan evaluatif yang bersifat formal dan mengedepankan aspek kognitif semata. Dalam penelitian ini dilakukan upaya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan dapat mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui pengisian kuesioner yang berisi tanggapan masyarakat pada masing-masing aspek pemberdayaan masyarakat, yang didukung pula dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail

dari masyarakat yang didapatkan melalui wawancara.

Tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh petugas penyuluh pendamping tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

Wawancara penulis dengan Petugas penyuluh pendamping menyatakan bahwa:

“setiap ada pertemuan dengan warga desa di Desa Sungai Rengas, hampir semua warga bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Memang kadang kala ada sebagian yang tidak bisa datang, tapi walaupun demikian biasanya mereka mengutus perwakilannya”. (Wawancara penulis dengan Informan, Januari 2014)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan-pertemuan dan kegiatan pembangunan fisik lingkungan tergolong cukup baik. Untuk membuktikan hasil wawancara di atas penulis melakukan observasi, dan diketahui bahwa tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat cukup tinggi dan tidak memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan golongan usia informan, namun memiliki hubungan dengan peran informan. Hal ini dapat diartikan bahwa apapun tingkat pendidikannya, jenis kelaminnya maupun usianya tidak mempengaruhi kemauan untuk berpartisipasi.

Tingkat kemauan berpartisipasi dipengaruhi oleh peran dalam kegiatan organisasi KSM, dimana berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa anggota Gapoktan,

dan anggota KSM memiliki kemauan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan masyarakat non pengurus memiliki kemauan yang sedang dan rendah untuk turut berpartisipasi.

Anggota Gapoktan, KSM memiliki kemauan untuk berpartisipasi yang tinggi karena disamping lebih banyak mendapatkan motivasi dan pengetahuan tentang konsep pembangunan partisipatif, mereka juga memiliki beban dan tanggungjawab untuk menyukseskan program pemberdayaan petani kelapa. Sedangkan masyarakat di luar kepengurusan cenderung kurang berpartisipasi karena mereka kurang mendapatkan dorongan untuk berpartisipasi lebih aktif dan tanggung jawab yang diembannya tidak sebesar pengurus atau orang-orang yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Tingkat keberanian masyarakat dalam memberikan masukan atau usulan dalam kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh penyuluh tergolong cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Ketua LPMD Sungai Rengas berikut ini.

“..kemampuan masyarakat dalam menyampaikan opininya sangat dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, dimana para pria /bapak-bapak lebih dominan dalam penyampaian opini atau usulan kegiatan, sedangkan para ibu hanya sebagian kecil saja yang dapat menyampaikan unek-uneknya”. (Wawancara penulis dengan Informan, Januari 2014)

Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa informan laki-laki cenderung memiliki keberanian lebih tinggi untuk menyampaikan

opiniya mengenai pembangunan di lingkungannya, hal ini disebabkan perbedaan peran antar gender yang masih kentara apalagi di lingkungan desa dimana posisi laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan. Sedangkan informan perempuan cenderung kurang aktif dalam menyampaikan opini terutama dalam forum-forum pertemuan yang melibatkan kelompok laki-laki. Sebenarnya sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta memberi kesempatan perempuan untuk menyampaikan usulan atau masukan telah diadakan pertemuan khusus bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan, namun dalam pertemuan khusus perempuan pun forum yang terbentuk lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang memang telah banyak berpengaruh dan berani mengemukakan pendapatnya, terutama perempuan-perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau bekerja di bidang formal, seperti perkantoran atau pendidikan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya instansi terkait dalam menyadarkan petani kelapa Desa Sungai Rengas agar memiliki kemampuan, keterampilan dan dan keahlian pada dasarnya sudah cukup baik. Namun dalam implementasinya dari sembilan program pemberdayaan petani kelapa hanya bisa tiga poin saja yang dapat dilaksanakan di

Desa Sungai Rengas, itupun pelaksanaanya belum optimal. Ketiga poin tersebut antara lain, pendidikan dan pelatihan masyarakat, kegiatan penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan temuan penelitian bahwa kendala dalam memberdayakan petani kelapa di Desa Sungai Rengas adalah terbatasnya anggaran dan jumlah petugas penyuluh pendamping.

2. Sikap dan cara pandang masyarakat Desa Sungai Rengas terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergolong cukup baik atau sedang. Sikap dan cara pandang masyarakat tersebut secara umum tidak dipengaruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam organisasi kemasyarakatan namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan kaum perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki, meskipun secara kuantitas tingkat partisipasinya bisa dikatakan telah mencukupi.

### **2. Rekomendasi**

Berdasarkan kajian literatur dan hasil temuan penelitian serta kesimpulan yang didapatkan, maka kami menyampaikan beberapa rekomendasi yang terdiri dari :

- a. Pemberdayaan masyarakat petani kelapa adalah proses yang berkelanjutan sehingga evaluasi pemberdayaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum

program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

- b. Pemberdayaan masyarakat pada petani kelapa tiap-tiap komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antar satu komunitas dengan yang lainnya, untuk itu indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan karakteristik komunitas itu dan karakteristik program yang dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indikator pemberdayaan masyarakat khusus untuk kasus-kasus tertentu dan indikator-indikator umum untuk semua program pemberdayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. <http://www.scribd.com/doc/173807023/undang-undang-republik-indonesia-nomor-19-tahun-2013-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani>. (diakses 12 Mei 2014).
- Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**  
 Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
 Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : A'ANG KURNIAWAN  
 NIM / Periode lulus : E01107053 / 22 Juli 2014  
 Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/HP : ang.kurniawan900@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA (COCONUT) DALAM MENINGKATKAN KESYAHTELAAN DI DESA SUNGAI RENAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal ... 19 Agustus 2014  
  
 Dr. Arifin, M.BA  
 NIP. 197105021993021002

Dibuat di :  
 Pada tanggal: 19 Agustus 2014  
  
 ( nama terang dan tanda tangan mhs  
 A'ANG KURNIAWAN )

catatan:  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di-scan dalam format-PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).